

PERAN PROGRAM PERHUTANAN SOSIAL DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN RUMAH TANGGA DI SEKITAR KAWASAN HUTAN (STUDI KASUS INDEPTH INTERVIEW PERHUTANAN SOSIAL FUNGSI STATISTIK KEHUTANAN BPS 2021)

Lodewik Zet*, Fajri Iramaya Purwanti, Eka Rudiana, Herzainul Nur Hakim, Muhammad Adnan
Badan Pusat Statistik, Jl. Dr. Sutomo 6-8 Jakarta, 10710, Indonesia
*E-Mail: lodewik@bps.go.id

Received: 11 Agustus 2022. *Accepted:* 9 Desember 2022.

ABSTRACT

The social forestry program is one of the government's flagship programs to support the welfare of households around forest areas. This program is expected to contribute to the achievement of the SDGs through social, economic, and environmental aspects. This study aims to determine the variables that affect the income of households receiving social forestry program assistance. The analytical method used in this research is multiple linear regression. The data used in this study came from the results of an in-depth interview on social forestry in 2021. Through this research, it was found that self-owned land, social forestry land, village forest schemes, and financial assistance had a significant effect on household income. Based on interviews with respondents who received social forestry programs, there are still many social forestry lands that have not been managed according to their designation. Thus, monitoring and evaluation is needed from the government to optimize the social forestry program

Key words: Social forestry, government programs, SDGs. multiple linear regression.

ABSTRAK

Program perhutanan sosial merupakan salah satu program unggulan pemerintah untuk mendukung kesejahteraan rumah tangga di sekitar kawasan hutan. Program ini diharapkan dapat berkontribusi pada pencapaian SDGs melalui aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui variabel yang berpengaruh terhadap pendapatan rumah tangga penerima bantuan program perhutanan sosial. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Data yang digunakan pada penelitian ini berasal dari hasil indepth interview perhutanan sosial tahun 2021. Melalui penelitian ini diketahui bahwa lahan milik sendiri, lahan perhutanan sosial, skema hutan desa, dan bantuan uang berpengaruh signifikan terhadap pendapatan rumah tangga. Berdasarkan wawancara dengan responden penerima program perhutanan sosial, masih banyak lahan perhutanan sosial yang belum dikelola sesuai dengan peruntukannya. Sehingga, diperlukan monitoring dan evaluasi dari pemerintah untuk mengoptimalkan program perhutanan sosial.

Kata kunci: Perhutanan sosial, program pemerintah, SDGs, regresi linear berganda.

PENDAHULUAN

Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Rakyat, Hutan Adat, dan Kemitraan Kehutanan (KLHK, 2016). Kebijakan tersebut berawal dari konsep social forestry, yakni suatu pendekatan yang melibatkan

masyarakat sebagai subjek dalam melakukan pengelolaan hutan sebagai upaya dalam mengurangi deforestasi dan degradasi hutan serta dampak negatifnya akibat aktivitas masyarakat lokal di sekitar hutan. Konsep social forestry ini sebenarnya bukan barang baru di Indonesia, konsep ini telah di terapkan dalam berbagai bentuk sejak tahun 1989 (Abdurrachman 2003; Wulandari and Inoue 2018) dalam (Laksemi dkk., 2019).

Luas lahan yang dialokasikan untuk program perhutanan sosial sebesar 12,7 juta Ha selama periode 2015-2019 (Karyana, 2017; Suharti dkk., 2017) dalam (Dewi, 2018). Pada tahun 2021, capaian program perhutanan sosial



telah mencapai angka sekitar 4,81 juta hektar, dengan jumlah Surat Keputusan (SK) hak kelola kawasan hutan sebanyak 7.296 Unit SK, dan 1.048.771 Kepala Keluarga (KK) penerima manfaat. Namun, angka ini masih jauh dari target yang sudah dicanangkan oleh pemerintah.

Program perhutanan sosial merupakan salah satu program strategis pemerintah. Menurut Bentham (1748-1832) teori dasar Kesejahteraan yaitu Welfare State. Teori tersebut menyatakan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin kesejahteraan masyarakat. Bentham menggunakan istilah utility (kegunaan) untuk menjelaskan konsep kebahagiaan atau kesejahteraan. Berdasarkan prinsip utilitarianisme yang ia kembangkan, Bentham berpendapat bahwa sesuatu yang dapat menimbulkan kebahagiaan ekstra adalah sesuatu yang baik. Sebaliknya, sesuatu yang menimbulkan sakit adalah buruk. Perhutanan sosial diharapkan dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi konflik hutan negara, ancaman degradasi dan deforestasi hutan, serta keterbatasan sumber daya manusia petugas kehutanan (Asmin dkk., 2019). Selain itu, program ini diharapkan dapat memberikan dampak ekonomi, sosial, dan pelestarian lingkungan sehingga dapat berkontribusi pada pencapaian SDGs (Sahide dkk., 2018).

Telah banyak penelitian kualitatif yang membahas keterkaitan program perhutanan sosial dengan kesejahteraan masyarakat, namun masih terbatas penelitian yang mengkaji keterkaitan program dengan pendapatan masyarakat secara kuantitatif. Berdasarkan penelitian sebelumnya, telah teridentifikasi variabel-variabel yang berpengaruh terhadap pendapatan dan kesejahteraan masyarakat penerima program perhutanan sosial. Variabel-variabel tersebut diantaranya: luas lahan milik (Susilo, 2019), luas lahan dari program perhutanan sosial yang dikelola masyarakat (Dewi, 2017), pemberian akses hutan melalui skema Hutan Desa (Roy dkk., 2019), bantuan dari pemerintah maupun swasta untuk stimulus program perhutanan sosial (Fitria et al., 2021), dan lama waktu pengelolaan lahan perhutanan sosial (Susilo, 2019). Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk

mengetahui variabel yang menjadi determinan terhadap pendapatan masyarakat penerima bantuan program perhutanan sosial. Penelitian ini merupakan hasil indepth interview perhutanan sosial yang dilakukan di 4 lokasi penerima program perhutanan sosial tahun 2021.

BAHAN DAN METODE

Lokasi Penelitian

Penelitian ini mencakup rumah tangga penerima bantuan program perhutanan sosial dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Penelitian dilakukan pada bulan Oktober sampai dengan November 2021. Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Garut, Brebes, Maros, dan Banten. Penelitian dilakukan dengan wawancara mendalam (indepth interview) untuk rumah tangga terpilih.

Tabel 1. Variabel Penelitian

Simbol	Keterangan	Satuan
PRT	Pendapatan rumah tangga	Ribu rupiah
LM	Luas lahan yang dimiliki rumah tangga	m ²
LPS	Luas lahan yang diperoleh dari program perhutanan sosial	m ²
HD	Keikutsertaan pada skema Hutan Desa (HD) perhutanan sosial	-
BU	Jumlah bantuan uang yang diterima dari pemerintah	Rupiah
Lama	Lamanya mengikuti program perhutanan sosial	Tahun

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan analisis inferensia. Analisis deskriptif digunakan untuk mengetahui luas lahan menurut status penguasaan, penggunaan lahan yang berasal dari program perhutanan sosial, dan proporsi pendapatan dari program perhutanan sosial. Analisis inferensia digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari variabel-variabel penelitian dalam menentukan pendapatan rumah tangga penerima bantuan program perhutanan sosial dengan menggunakan Regresi Linier Berganda. Bentuk persamaan Regresi Linier Berganda, sebagai berikut:

$$PRT = \alpha + \beta_1 LM + \beta_2 LPS + \beta_3 HD + \beta_4 BU + \beta_5 Lama + \epsilon, \dots \dots \dots (1)$$

α = konstanta,

β = koefisien regresi,

ϵ = error.

Pada model regresi linear yang terbentuk, dilakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas, dan uji multikolinearitas. Model regresi disebut sebagai model yang baik jika model tersebut memenuhi asumsi klasik yaitu data residual terdistribusi normal (normalitas), tidak ada korelasi yang terjadi antara residual pada suatu pengamatan dengan pengamatan lain (non-autokorelasi), tidak ada ketidaksamaan varian dari residual pengamatan satu dengan pengamatan lainnya (non-heteroskedastisitas), dan tidak ada hubungan linear yang sempurna atau mendekati sempurna

$$R^2 = \frac{\sum(\hat{Y}_i - \bar{Y})^2}{\sum(Y_i - \bar{Y})^2} = \frac{SSR}{SST} = 1 - \frac{SSE}{SST} \dots \dots \dots (2)$$

dimana
 SSR: sum square regression,
 SST: sum square total,
 SSE: sum square error.

Nilai koefisien determinasi berkisar dari 0 hingga 1, dimana semakin mendekati 1, maka menunjukkan variabel independen semakin baik dalam menjelaskan variasi dari variabel dependen.

$$F_{hitung} = (R^2 / (N+k-1)) / ((1-R^2) / (NT-N-k)) \dots \dots \dots (3)$$

Keputusan tolak H_0 berarti minimal ada satu variabel independen yang signifikan berpengaruh terhadap variabel dependen. Keputusan ini dapat juga didasarkan pada perbandingan nilai p-value dengan tingkat signifikansinya (α).

Uji t merupakan uji yang berfungsi untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Hipotesis pengujian:

$$t_{hitung} = \beta_i / (se(\beta_i)) \dots \dots \dots (4)$$

Hipotesis nol akan ditolak jika $t_{hitung} > t_{\alpha/2}(NT-N-k)$ atau $t_{hitung} < -t_{\alpha/2}(NT-N-k)$. Keputusan ini dapat juga didasarkan pada perbandingan nilai p-value dengan tingkat signifikansinya (α).

Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari kegiatan indepth interview Perhutanan Sosial Indonesia 2021 di Kabupaten Garut, Brebes, Maros, dan Banten.

antara variabel independen (non-multikolinearitas).

Pengujian keberartian model regresi linear berganda dilakukan dengan kriteria evaluasi, yaitu koefisien determinasi (R^2), pengujian koefisien regresi secara simultan (Uji F), dan pengujian keberartian koefisien regresi secara parsial (Uji t). Koefisien determinasi digunakan untuk menentukan seberapa baik garis regresi sampel fit (cocok) pada data (goodness of fit), atau secara verbal koefisien ini mengukur proporsi dari total variasi pada variabel tak bebas Y yang dapat dijelaskan oleh model regresi (Gujarati, 2011). Koefisien determinasi dapat dirumuskan sebagai berikut:

Uji F dalam regresi linear berganda memiliki fungsi untuk mengetahui pengaruh variable independen secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen. Hipotesis yang digunakan:

$H_0: \beta_1 = \beta_2 = \dots = \beta_k = 0$ (secara simultan tidak ada pengaruh signifikan terhadap variabel

H_1 : minimal ada satu nilai $\beta_i \neq 0; i=1, 2, \dots, k$
 Statistik uji F dirumuskan sebagai berikut:

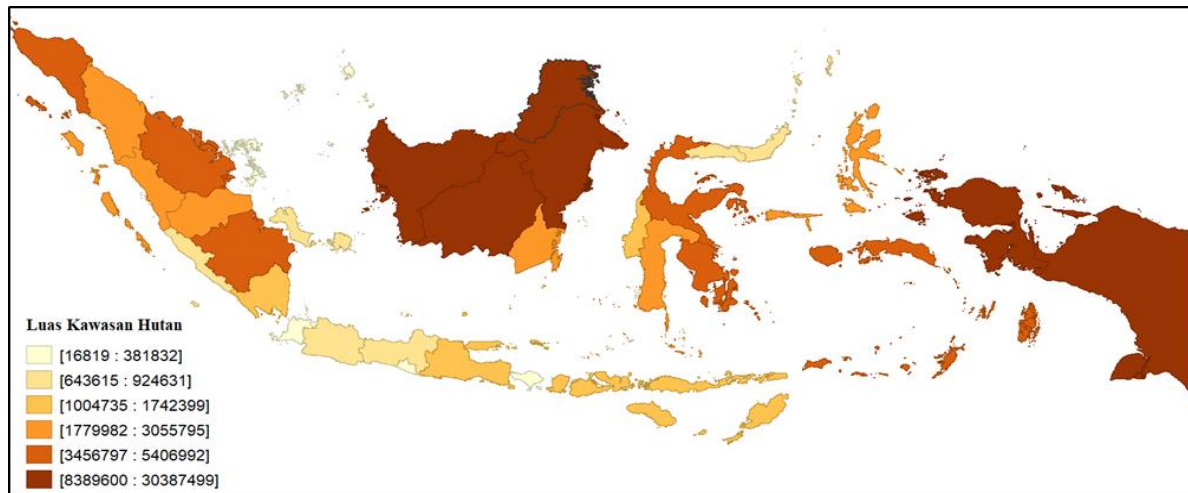
$H_0: \beta_i = 0$, tidak ada pengaruh yang signifikan dari variabel independen tertentu terhadap variabel dependen.

$H_1: \beta_i \neq 0$, ada pengaruh yang signifikan dari variabel independen tertentu terhadap variabel dependen.

Statistik uji yang digunakan adalah statistik uji t-student. Formulanya sebagai berikut:

Data yang digunakan antara lain: luas lahan menurut status penguasaan (lahan milik sendiri, lahan program perhutanan sosial, dan lahan lainnya), penggunaan lahan yang berasal dari program perhutanan sosial, proporsi pendapatan rumah tangga dari program perhutanan sosial, pendapatan rumah tangga, keikutsertaan pada skema Hutan Desa (HD) perhutanan sosial, jumlah bantuan uang yang diterima dari pemerintah, dan lama rumah tangga mengikuti program perhutanan sosial.

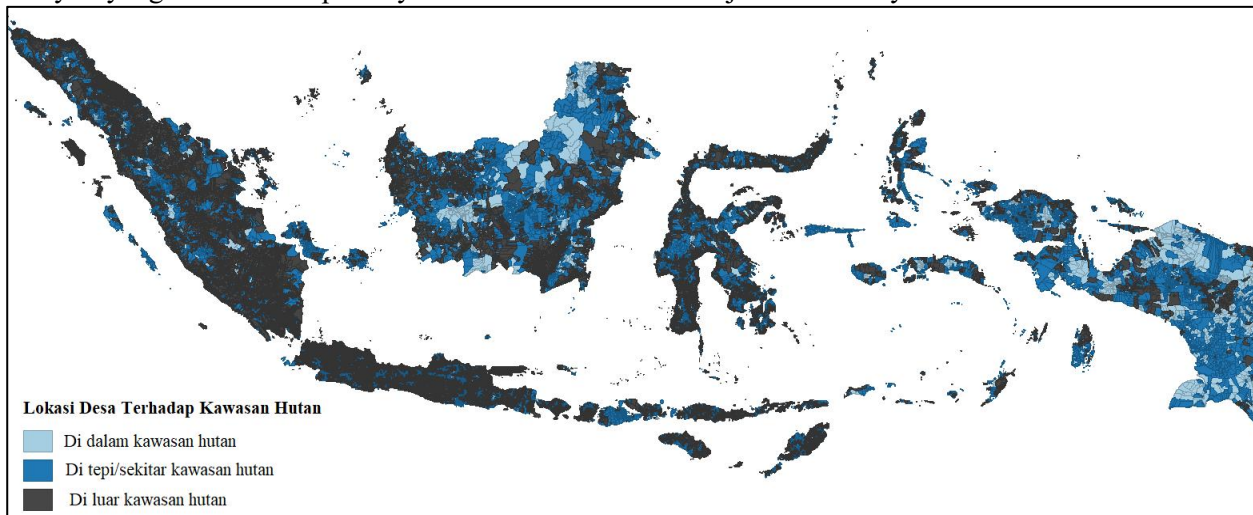
HASIL DAN PEMBAHASAN



Gambar 1. Peta Kawasan Hutan Menurut Provinsi di Indonesia, Tahun 2021.

Berdasarkan peta kawasan hutan pada Gambar 1 diketahui bahwa Pulau Kalimantan dan Papua memiliki kawasan hutan terluas, dibandingkan dengan pulau lainnya di Indonesia. Sedangkan pulau yang memiliki kawasan hutan terkecil adalah Pulau Jawa. Kondisi ini mengindikasikan bahwa wilayah dengan populasi dan aktivitas ekonomi yang tinggi akan memiliki kawasan hutan yang relatif kecil. Bertolak belakang dengan kondisi tersebut, wilayah yang masih ditutupi banyak hutan akan

mengalami perlambatan dari sisi pembangunan. Fenomena ini seperti halnya dua mata pisau, di satu sisi hutan perlu kita jaga kelestariannya sebagai sumber kehidupan. Namun, disisi lain dengan terisolirnya wilayah dengan hutan, maka wilayah tersebut akan sulit diakses, sehingga akan menghambat pembangunan. Oleh sebab itu, melalui program perhutanan sosial diharapkan akan menjadi jembatan dalam mengatasi isu pelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

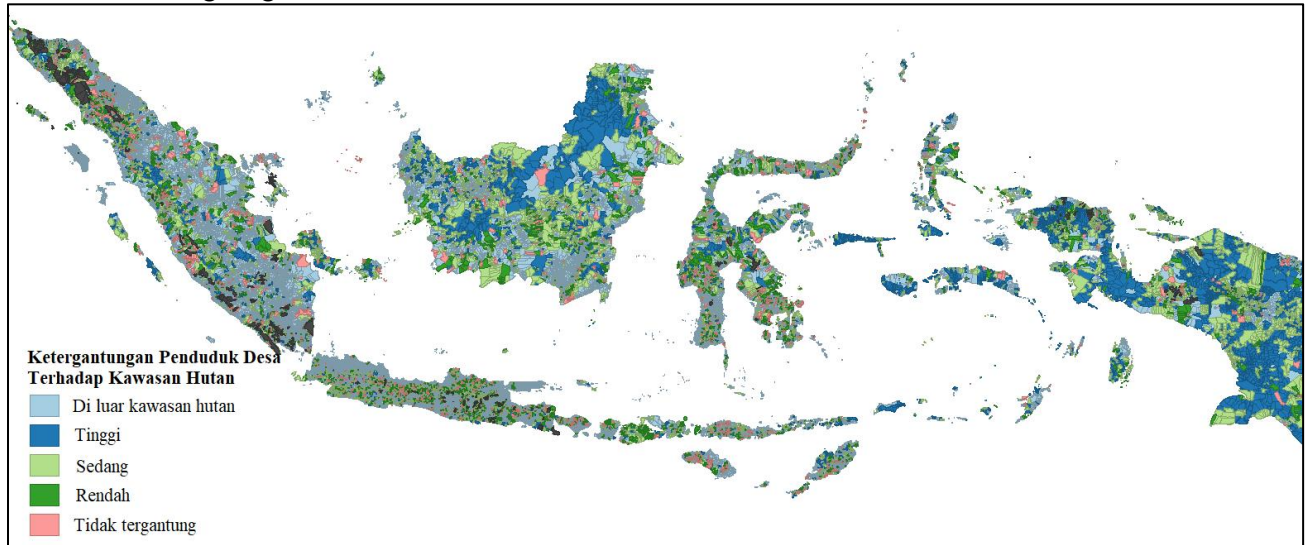


Gambar 2. Peta Lokasi Desa Terhadap Kawasan Hutan, Tahun 2018.

Sejalan dengan luas kawasan hutan, Pulau Kalimantan dan Pulau Papua memiliki desa/kelurahan terbanyak berada di sekitar kawasan hutan. Pembangunan wilayah pedesaan merupakan cikal bakal pembangunan pada tingkat global. Sehingga diperlukan optimalisasi kinerja pembangunan dengan memperhatikan potensi wilayah. Belakangan ini pemerintah

telah mengeluarkan program dana desa untuk memacu pembangunan wilayah pedesaan. Sejalan dengan program dana desa, pemerintah telah menginstruksikan untuk mengalokasikan sebagian dana desa sebagai stimulus program perhutanan sosial, khususnya pada wilayah yang berada di sekitar kawasan hutan. Melalui kolaborasi kedua program tersebut diharapkan

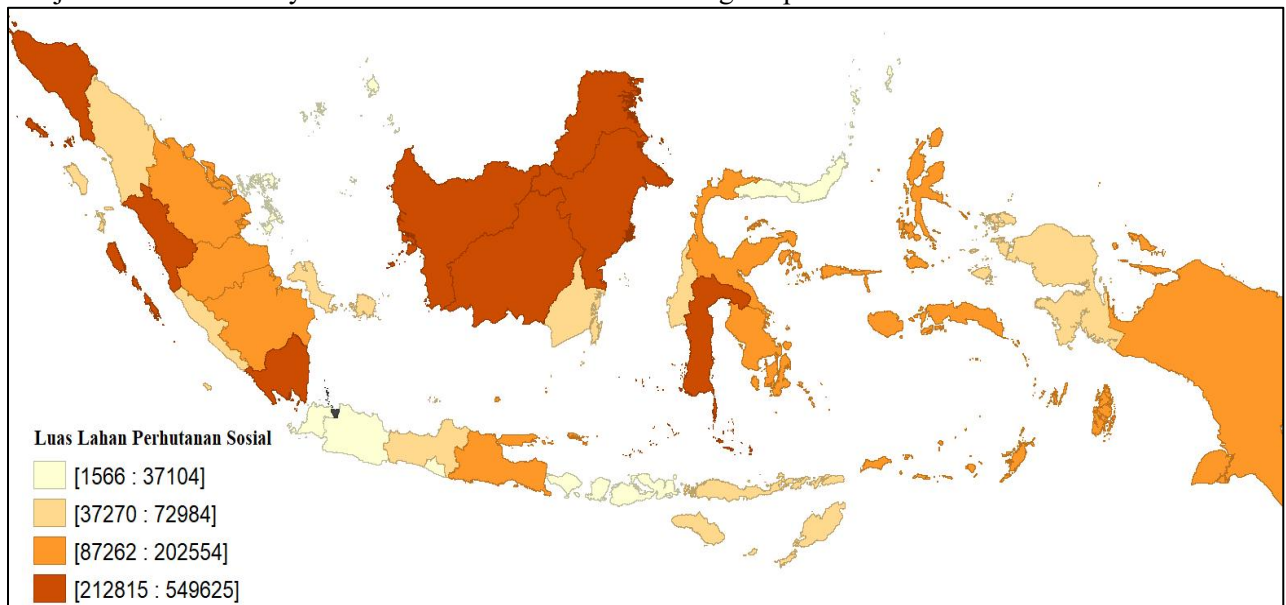
akan berdampak positif pada aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan.



Gambar 3. Peta Ketergantungan Penduduk Desa Terhadap Kawasan Hutan, Tahun 2018.

Pada wilayah yang berada di sekitar kawasan hutan, interaksi masyarakat terhadap kawasan hutan cenderung tinggi. Sulitnya akses menuju lokasi yang lebih maju, menjadi salah satu alasan masyarakat untuk tetap tinggal di sekitar kawasan hutan. Masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan dan memiliki keterbatasan akses cenderung untuk memanfaatkan sumber daya hutan. Kondisi ini menjadikan masyarakat memiliki

ketergantungan yang tinggi terhadap kawasan hutan. Berdasarkan Gambar 3, diketahui bahwa Pulau Papua dan Pulau Kalimantan bagian utara memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap kawasan hutan. Oleh karena itu, diperlukan upaya pemerintah untuk memantau dan mengarahkan aktivitas masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan, agar program-program yang telah disusun dapat berjalan dengan optimal.



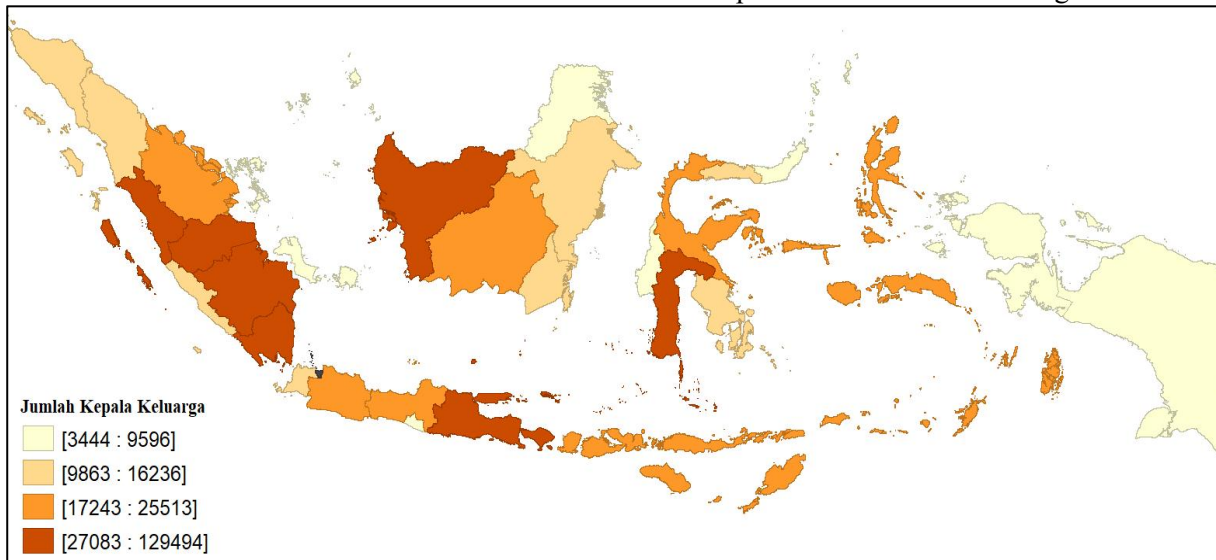
Gambar 4. Peta Realisasi Lahan Kawasan Hutan Untuk Perhutanan Sosial.

Berdasarkan Gambar 4 diketahui bahwa realisasi pemberian akses kelola perhutanan sosial terbesar berada di Pulau Kalimantan. Hal ini sejalan dengan luas kawasan hutan yang terdapat di Pulau Kalimantan. Kondisi sebaliknya terlihat di Pulau Papua. Dengan

lahan kawasan hutan yang sangat melimpah, namun realisasi pemberian akses kelola relatif kecil. Kondisi ini disebabkan karena banyaknya wilayah di Provinsi Papua berupa dataran tinggi dan sulit diakses oleh masyarakat. Selain itu, konflik terkait hutan adat yang sudah bersifat

turun-temurun mengakibatkan pemerintah sulit

untuk mengelola lahan yang sebenarnya merupakan tanah/hutan milik negara.



Gambar 5. Jumlah Kepala Keluarga Penerima Perhutanan Sosial.

Berdasarkan Gambar 5 diketahui bahwa jumlah kepala keluarga penerima program perhutanan sosial terbanyak di Provinsi Kalimantan Barat dan Wilayah Sumatera Bagian Selatan. Sejalan dengan realisasi lahan kawasan hutan yang telah diberikan oleh pemerintah, Provinsi Papua merupakan provinsi dengan penerima program perhutanan sosial yang paling sedikit. Hasil ini bertolak belakang dengan luas

lahan kawasan hutan di Provinsi Papua. Potensi kawasan hutan yang melimpah di Provinsi Papua semestinya bisa dijadikan alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Diketahui pada Tahun 2021 lebih dari seperempat penduduk Provinsi Papua berstatus miskin, dan Provinsi Papua menempati peringkat terakhir dari 34 Provinsi di Indonesia.

Tabel 2. Persentase Luas Lahan, Penggunaan Lahan dan Pendapatan dari Program Perhutanan Sosial

Variabel	Nilai
Luas lahan menurut status penguasaan (m ²)	939.510,00
% Lahan milik sendiri	44,07
% Lahan program perhutanan sosial	42,15
% Lahan lainnya	13,78
Penggunaan lahan yang berasal dari program perhutanan sosial	
% Tanaman tahunan	40,01
% Budidaya tanaman kehutanan	30,07
% Tanaman semusim	29,45
% Usaha kehutanan lainnya	0,46
Proporsi pendapatan dari program perhutanan sosial	
% Rumah tangga yang memiliki proporsi > 75 %	5,88
% Rumah tangga yang memiliki proporsi 50 - 75 %	17,65
% Rumah tangga yang memiliki proporsi 25 - 50 %	17,65
% Rumah tangga yang memiliki proporsi < 25 %	58,82

Sumber: Data Indepth Interview Perhutanan Sosial 2021, diolah

Berdasarkan Tabel 2, diketahui bahwa lahan milik sendiri memiliki porsi yang terbesar pada rumah tangga, disusul dengan lahan yang

berasal dari program perhutanan sosial. Jika diklasifikasikan menurut penggunaan lahan yang berasal dari program perhutanan sosial,

penggunaan lahan untuk tanaman tahunan memiliki porsi terbesar diikuti dengan budidaya tanaman kehutanan dan tanaman semusim. Program perhutanan sosial memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendapatan. Salah satu penyebab keterbelakangan kesejahteraan masyarakat karena aspek geografis. Masyarakat di sekitar kawasan hutan pada umumnya memiliki akses yang sulit untuk meningkatkan kesejahterannya. Fasilitas kesehatan dan pendidikan yang merupakan motor penggerak kesejahteraan masih jarang didapatkan di desa yang berlokasi di sekitar kawasan hutan. Sehingga, salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah melalui peningkatan pendapatan masyarakat di sekitar kawasan hutan. Berdasarkan hasil wawancara dengan responden penerima program perhutanan sosial, didapatkan informasi bahwa sebagian besar rumah tangga mendapatkan porsi yang kecil dari program perhutanan sosial. Masyarakat pada umumnya memiliki sumber pendapatan yang utama, selain aktivitas dari program perhutanan sosial. Berdasarkan informasi di lapangan, hanya sebagian kecil yang mengandalkan pendapatan dari program perhutanan sosial. Fenomena ini dikarenakan masih belum optimalnya pemanfaatan kawasan hutan.

Tabel 3. Hasil Estimasi Regresi.

Variabel	Model 1	Model 2	Model 3	Model 4	Model 5
LM	0.469***	0.358***	0.377***	0.462***	0.477***
LPS		0.859***	1.376***	1.221***	1.227***
HD			39,305.885***	40,261.284***	40,018.08***
BU				0.000***	0.001***
Lama					60.3078
konstanta	29,296.533***	23,610.896***	14,996.108***	14,006.990***	13,297.710***
R-squared	0.058	0.174	0.379	0.414	0.415

Robust standard errors in parentheses *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
 Variabel terikat pendapatan rumah tangga

Sumber: Data Indepth Interview Perhutanan Sosial 2021

Berdasarkan Tabel 2, diketahui bahwa lahan milik sendiri dan lahan yang berasal dari program perhutanan sosial memiliki pengaruh positif dan signifikan. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa luas lahan yang dikelola berpengaruh positif terhadap pendapatan masyarakat (Susilo, 2019). Pada model 2 sampai dengan model 5, lahan perhutanan sosial memiliki koefisien yang lebih tinggi dibandingkan dengan lahan milik sendiri. Fenomena ini menunjukkan bahwa lahan perhutanan sosial memiliki potensi besar untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Melalui hak akses yang diberikan oleh Pemerintah, masyarakat bisa mengelola lahan tersebut tanpa dibebani iuran/retribusi. Berbeda dengan lahan milik sendiri, rumah tangga memiliki keterbatasan dalam memiliki suatu lahan. Melalui keterbandingan pengelolaan lahan, dapat diketahui bahwa lahan perhutanan sosial sangat efektif dalam meningkatkan pendapatan masyarakat. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa lahan perhutanan sosial berpengaruh positif terhadap pendapatan masyarakat (Dewi, 2017).

Pada model 3 sampai dengan model 5, diketahui bahwa skema hutan desa memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap

pendapatan masyarakat. Variabel skema hutan desa memiliki koefisien yang paling tinggi dalam hasil penelitian ini. Hutan Desa merupakan hutan negara yang dikelola oleh lembaga desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa. Pengelolaan hutan oleh lembaga desa merupakan salah satu upaya dalam mengelola kawasan hutan. Aparatur desa memiliki peranan penting dalam optimalisasi pemanfaatan hutan. Melalui hutan desa, masyarakat setempat akan diberdayakan secara berkelompok untuk mengelola kawasan hutan. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa pemberian akses hutan melalui skema Hutan Desa berdampak positif terhadap penyerapan tenaga kerja dan pendapatan masyarakat (Roy et al., 2019).

Dalam pelaksanaan program perhutanan sosial, masyarakat kerap kali menerima bantuan uang baik dari pemerintah daerah maupu dari pemerintah pusat. Bantuan tersebut diharapkan dapat menjadi stimulus dalam pengelolaan lahan perhutanan sosial. Dari hasil regresi diketahui bahwa bantuan uang memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap pendapatan masyarakat. Hal ini sudah sesuai dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa bantuan

dari pemerintah maupun swasta menjadi stimulus program perhutanan sosial, sehingga akan berdampak pada pendapatan masyarakat (Fitria et al., 2021). Namun, jika diperhatikan koefisien regresi ini relatif kecil jika dibandingkan dengan variabel lainnya dalam observasi ini. Fenomena ini disebabkan karena tidak tepatnya peruntukan bantuan terhadap program perhutanan sosial. Bantuan berupa penyuluhan sangat diperlukan untuk mengoptimalkan kinerja dari program perhutanan sosial. Kondisi ini didukung oleh hasil regresi yang menyatakan bahwa lama program perhutanan sosial tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan masyarakat.

Surat Keputusan pengelolaan hutan oleh masyarakat sudah berlangsung lama, namun masih banyak masyarakat yang belum mengoptimalkan lahan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan penerima program perhutanan sosial, didapatkan informasi bahwa masyarakat masih belum memiliki cukup informasi dalam mengelola lahan tersebut. Tidak sedikit dari masyarakat juga masih mengharapkan benih, pupuk, pestisida, dan bantuan lainnya untuk mengelola lahan tersebut. Melalui fenomena ini dapat diketahui bahwa tahap penerbitan SK pengelolaan kawasan bukan merupakan tahap akhir. Diperlukan juga monitoring dan evaluasi dari program untuk memantau kinerja dari program perhutanan sosial. Program perhutanan sosial merupakan salah satu program yang baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program ini juga berhasil diterapkan di beberapa negara, antara lain: India, Bangladesh, dan Tanzania. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, fungsi pengawasan memiliki peranan penting dalam pencapaian program perhutanan sosial. Hal ini juga sesuai dengan kajian sebelumnya yang menyatakan bahwa struktur administrasi pemerintahan harus hadir dalam program perhutanan sosial melalui program-program lanjutan untuk memperkuat kemampuan warga di sekitar kawasan hutan, mulai dari penyiapan sarana dan prasarana produksi, pelatihan dan penyuluhan, akses pada informasi pasar dan teknologi, akses pembiayaan, dan penyiapan pasca panen.

KESIMPULAN

Program perhutanan sosial merupakan program yang berbasis pada masyarakat dan lingkungan. Program ini diharapkan dapat memberikan dampak sosial, ekonomi, dan

lingkungan. Selain itu, program ini diharapkan dapat berkontribusi pada pencapaian SDGs. Melalui penelitian ini diketahui bahwa lahan milik sendiri, lahan perhutanan sosial, skema hutan desa, dan bantuan uang berpengaruh signifikan terhadap pendapatan masyarakat. Di samping itu, terdapat variabel yang tidak signifikan, yaitu lamanya masyarakat dalam mengikuti program perhutanan sosial. Berdasarkan wawancara dengan responden penerima program perhutanan sosial, diketahui bahwa masih banyak lahan yang belum dikelola sesuai dengan peruntukannya. Sehingga diperlukan monitoring dan evaluasi dari pemerintah untuk mengoptimalkan program perhutanan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmin, F., Darusman, D., Ichwandi, I., & Suharjo, D. 2019. Mainstreaming community-based forest management in West Sumatra: Social forestry arguments, support, and implementation. *Forest and Society*, 3(1), 77–96.
- Dewi, I. N. 2017. Kemiskinan dan strategi penanggulangannya melalui program kehutanan sosial di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Buletin Eboni*.
- Dewi, I. N. 2018. Kemiskinan masyarakat sekitar hutan dan program perhutanan sosial. *Buletin Eboni*, 15(2), 65–77.
- Fitria, W., Suharjo, D., & Ekawati, S. 2021. Peran kesatuan pengelolaan hutan (KPH) dalam implementasi perhutanan sosial: Studi di KPH Produksi Kerinci, Provinsi Jambi dan KPH Lindung Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol*, 18(2), 145–160.
- Gujarati, D. N. 2011. *Econometrics by example* (Vol. 1). Palgrave Macmillan New York.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Pub. L. No. P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 Tentang Perhutanan Sosial. 2016. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/163479/permen-lhk-no-83-tahun-2016>
- Laksemi, N. P. S. T., Sulistyawati, E., & . M. 2019. Sustainable Social Forestry in Bali (A Case Study at Hutan Desa Wanagiri). *Jurnal Sylva Lestari*, 7(2), 150. <https://doi.org/10.23960/jsl27150-163>

- Penulis, T., Zakaria, R. Y., Wiyono, E. B., Firdaus, A. Y., Suharjo, D., Muhsy, M. A., Salam, R., Aprianto, T. C., Uliyah, L., & Agraria, S. R. (n.d.). *Naskah Akademik Reformulasi Kebijakan Perhutanan Sosial*.
- Roy, J., Kuncoro, M., & Darma, D. C. 2019. Kajian dampak ekonomi hutan desa terhadap pendapatan petani Kampung Merabu (Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur). *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 15(2), 197–216.
- Sahide, M. A. K., Jusuf, Y., Alam, S., Millang, S., Mahbub, A. S., Bachtiar, B., Sabar, A., Nursaputra, M., Ahmad, M. F., & Yahya, N. H. 2018. *Kajian dampak perhutanan sosial Provinsi Sulawesi Selatan*. Fakultas Kehutanan, Universitas Hasanuddin.
- Susilo, Y. S. 2019. Dampak perhutanan sosial terhadap pendapatan masyarakat. *ISEI Economic Review*, 3(1), 16–27.